



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 257 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN YAHUKIMO, PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022, PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2021, PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO, PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO, DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pembahasan pembentukan produk hukum daerah berupa Peraturan, yang akan ditetapkan menjadi peraturan Bupati maka perlu dibentuk tim penyusun untuk menyusun peraturan yang dimaksud;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Yahukimo, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022, Peraturan Bupati Nomor 44 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Peraturan Bupati Nomor 45 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Yahukimo, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan produk hukum daerah, serta melaporkan hasil penyusunan kepada Bupati Yahukimo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim dimaksud Diktum KESATU diatas akan diberikan Honor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Sekretariat daerah pada Bagian Hukum Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 14 November 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 257 Tahun 2022
Tanggal : 14 November 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN YAHUKIMO, PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022, PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2021, PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO, PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO, DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH YANG DITERIMA
1	SUHAYATNO, SH	PENGARAH	4.500.000
2	VISDITA A. RAHAYAAN, SH	KETUA	3.900.000
3	DANIEL PARANDUK, SH	SEKRETARIS	3.000.000
4	YANSON PAHABOL, SH	ANGGOTA	3.000.000
5	LUTHER FARYON, SH, MH	ANGGOTA	3.000.000
6	ERMI SILAK, SH	ANGGOTA	3.000.000
7	HERMAN YANDO, SH	ANGGOTA	3.000.000
8	LUTHER ASSO, SH	ANGGOTA	3.000.000

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009